



Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia 2015-2019

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia



1. Tantangan Yang Dihadapi Indonesia

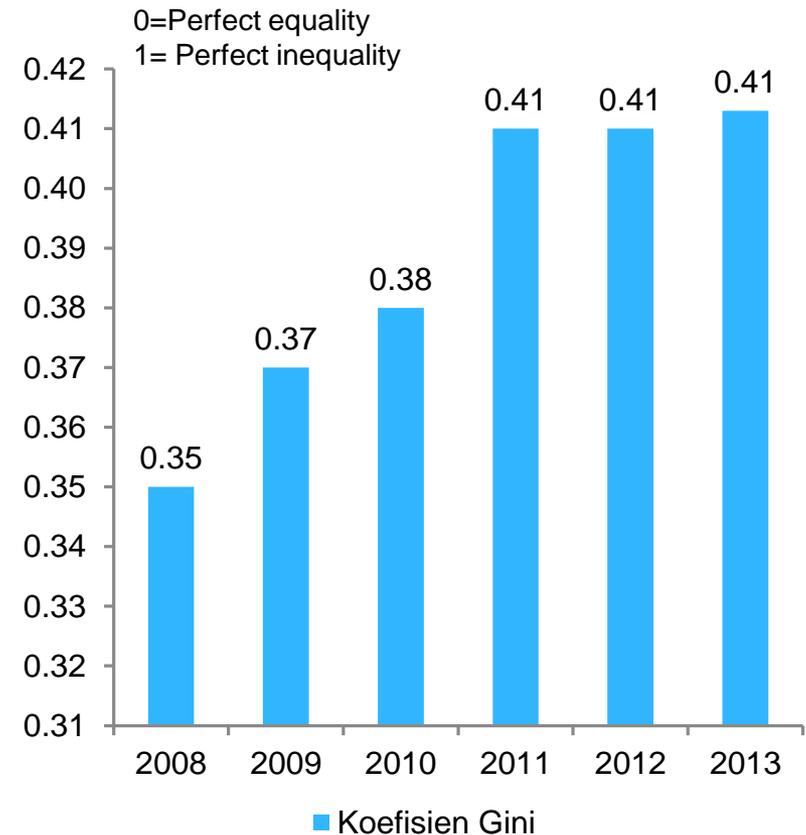
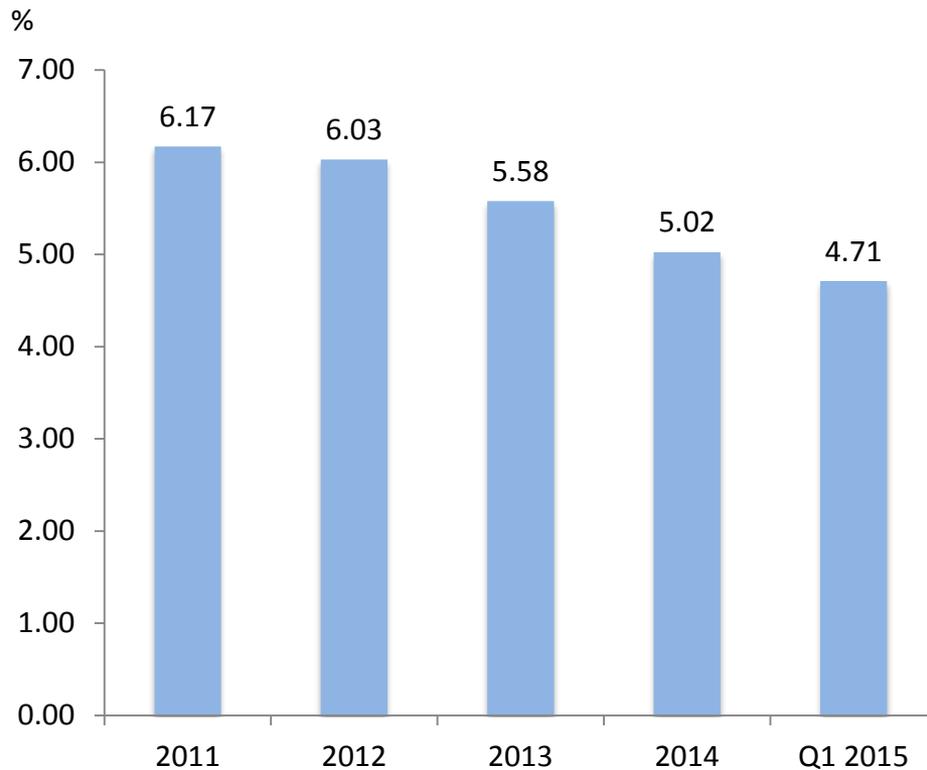
1. Strategi dan Peluang Untuk Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
2. Kesimpulan



Pertumbuhan Ekonomi Yang Terus Melambat, Dan Ketimpangan Pendapatan Yang Persisten Pada Level Yang Tinggi..

Perekonomian Indonesia terus tumbuh melambat sejak tahun 2012, dari 6.03% menjadi 5.02% di tahun 2014, dan 4.71% di kuartal I 2015

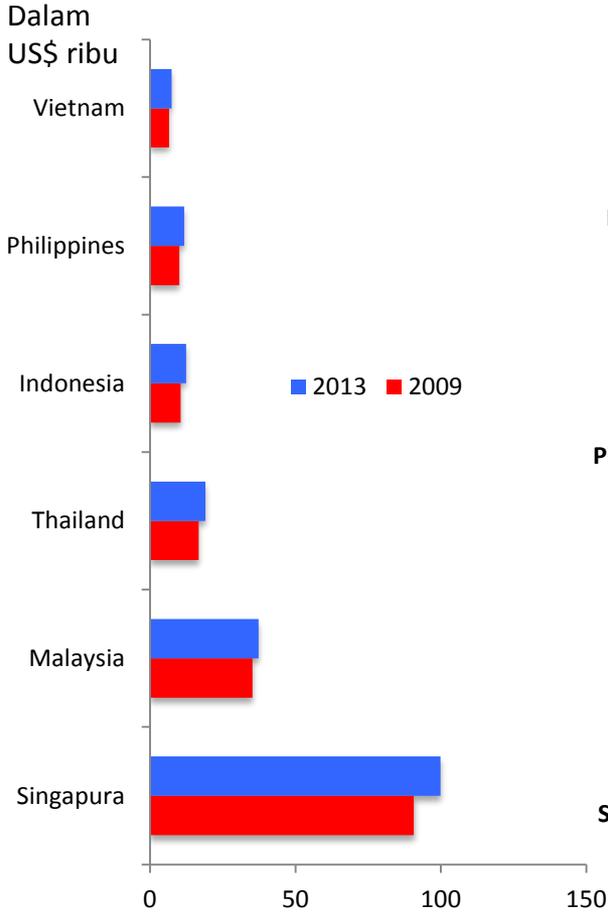
Disisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi, juga diikuti dengan angka koefisien gini yang relatif persisten pada level yang tinggi



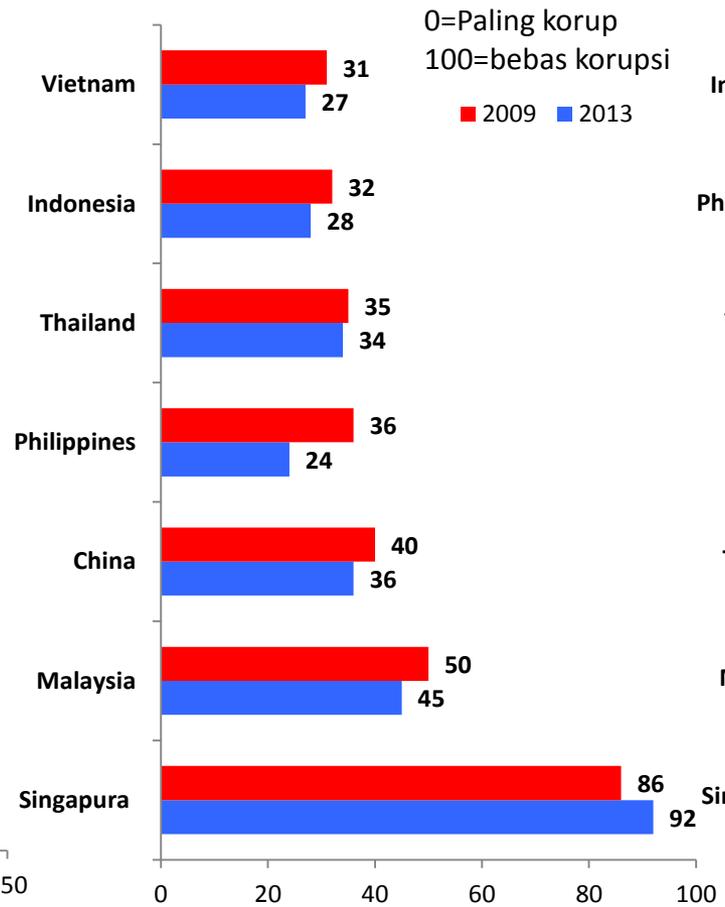


Daya Saing Yang Masih Kalah Dibandingkan Negara-Negara Tetangga

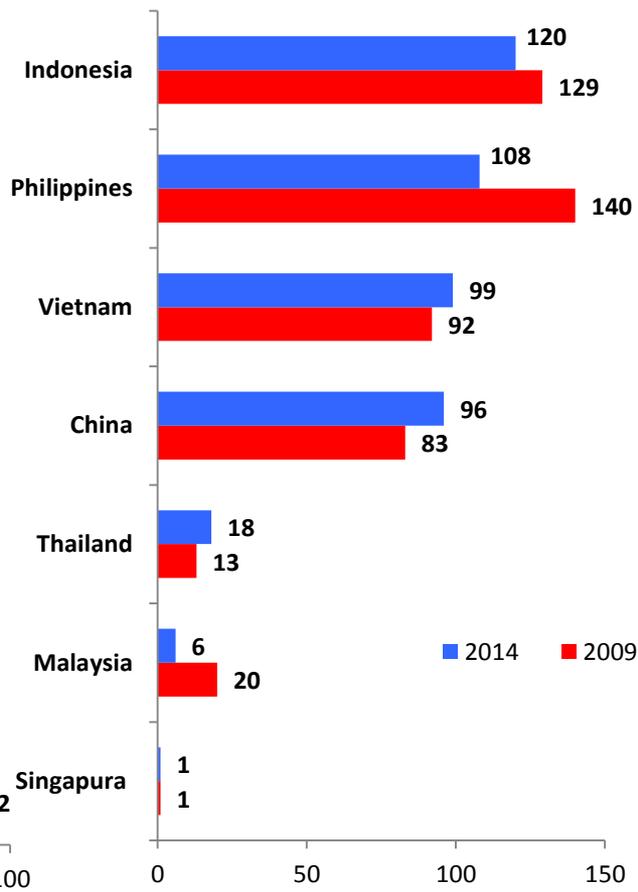
Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand



Indeks Persepsi Korupsi Indonesia salah satu yang terburuk di ASEAN



Indonesia juga menempati peringkat 120, terendah di ASEAN, dalam hal kemudahan bisnis



Sumber: TEDI 2014-The Conference Board

Sumber: Transparency International

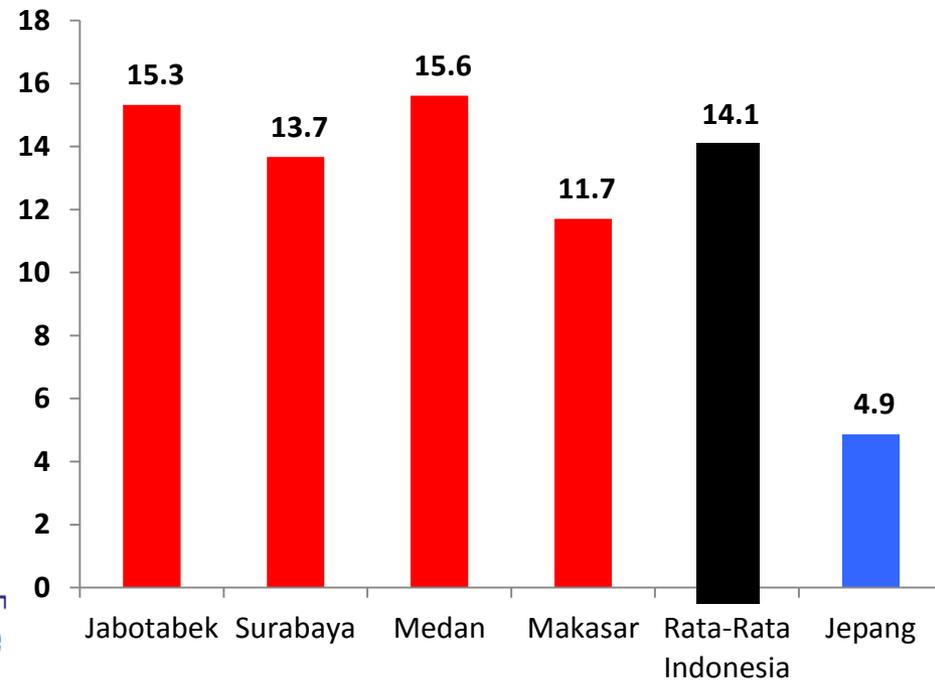
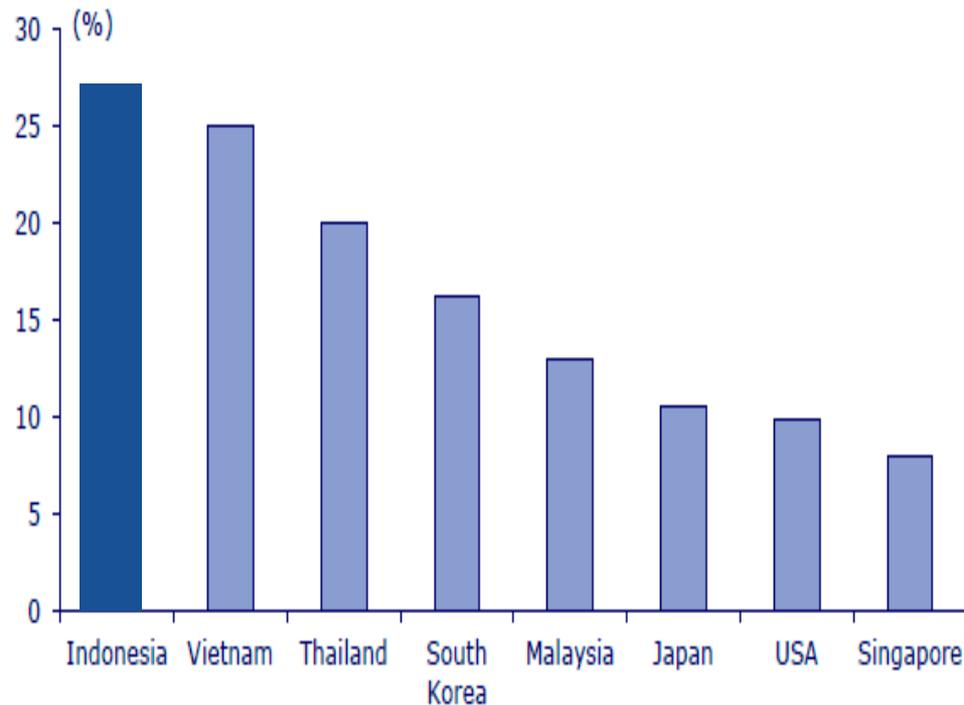
Sumber: Bank Dunia



Diperparah Dengan Kualitas Infrastruktur Yang Buruk...

Biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari total GDP, salah satu yang tertinggi di regional

Selain itu, biaya transportasi di Indonesia mencapai 14.1% dari seluruh biaya produksi, hampir 3x lebih tinggi dibandingkan Jepang

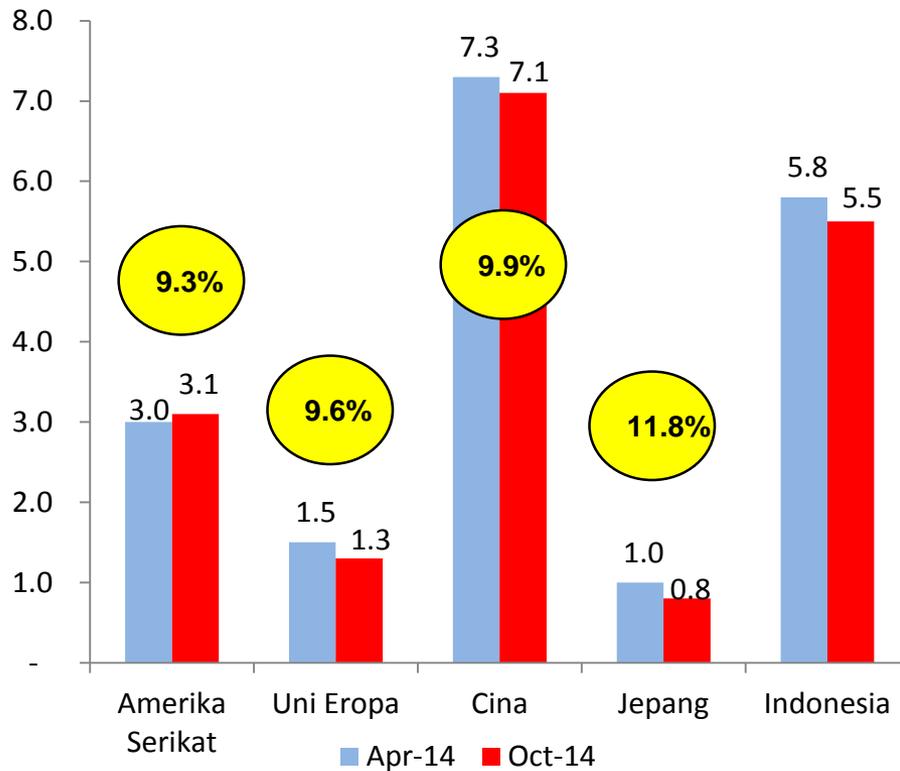


Target perbaikan infrastruktur adalah menurunkan rasio biaya transportasi terhadap biaya produksi mencapai dibawah 10%.



Serta Pelemahan Ekonomi Global...

Revisi Pertumbuhan Ekonomi Global 2015

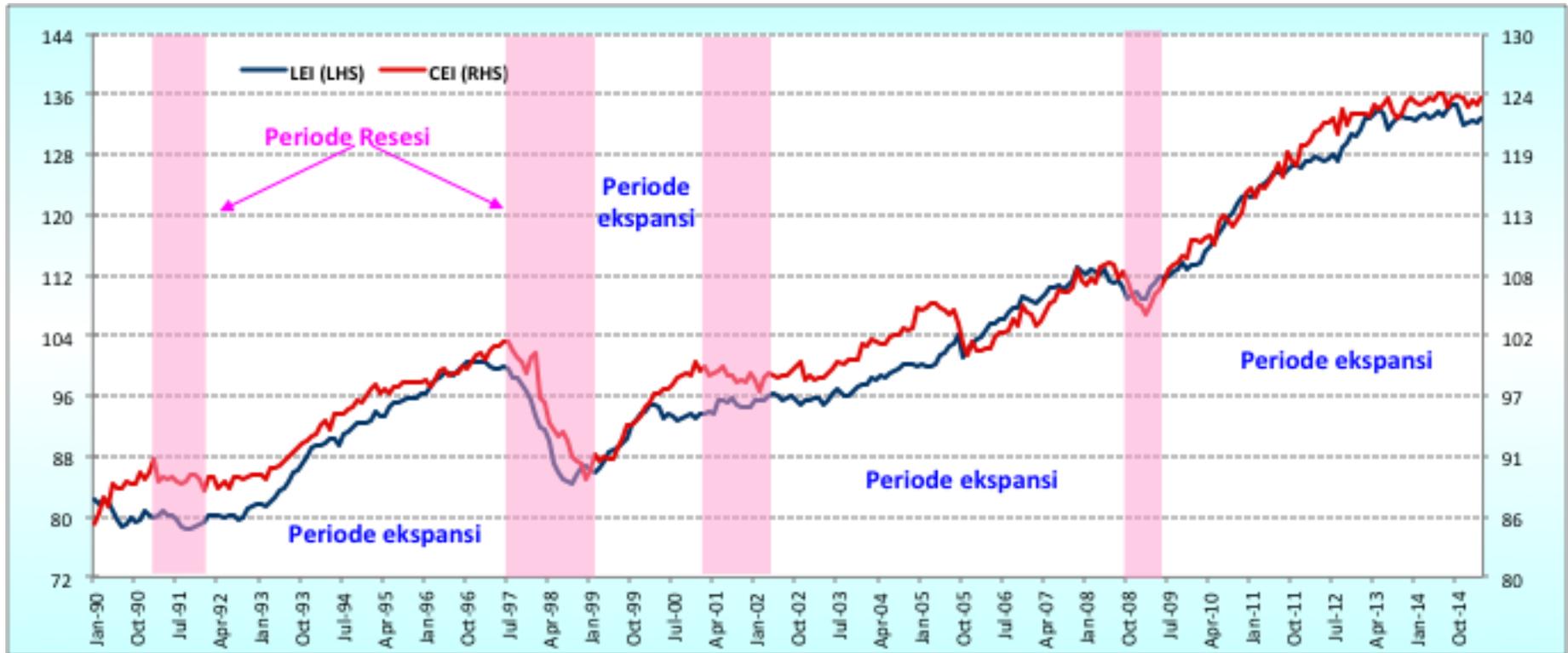


XX% = Pangsa ekspor Indonesia

- Pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia, seperti China, Jepang, dan Uni Eropa (31% dari total ekspor), telah mengalami perlambatan.
- Hal diatas akan mempengaruhi nilai dan volume ekspor kita yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Namun, Amerika Serikat, diperkirakan akan tumbuh lebih cepat. Hal ini yang menjadi salah satu harapan untuk mendorong perekonomian global.



Waspada Siklus Bisnis Indonesia: 7 Tahunan



- Setiap perekonomian memiliki siklus bisnis yang tidak bisa dihindari
- Perekonomian Indonesia memasuki masa ekspansi sejak Maret 2009. Dengan siklus bisnis 7 tahunan, ada risiko perekonomian Indonesia memasuki masa resesi lagi pada tahun 2016.
- Untuk meminimalkan risiko resesi, dibutuhkan kebijakan countercyclical dari aspek fiskal dan moneter

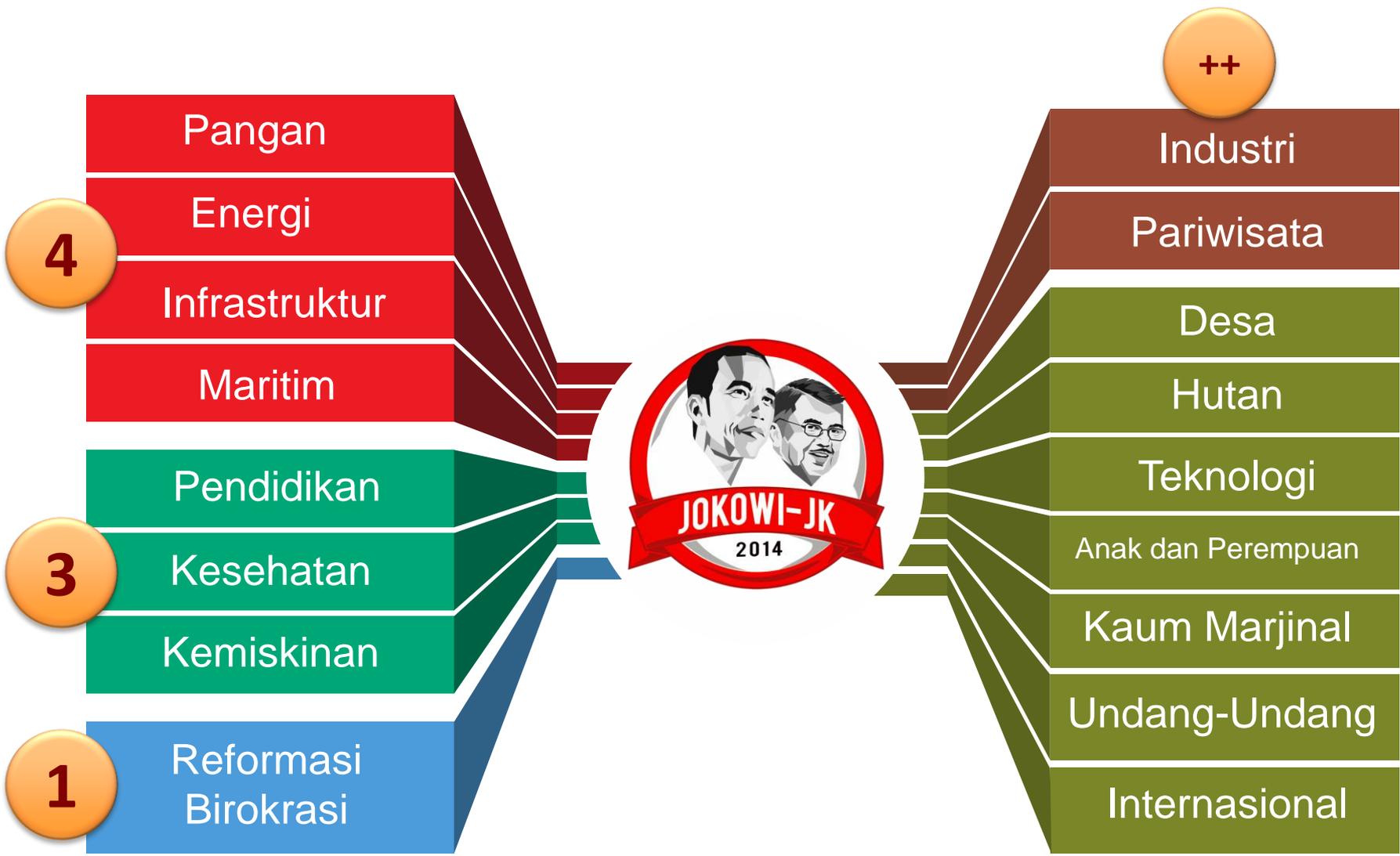


1. Tantangan Yang Dihadapi Indonesia

1. Strategi dan Peluang Untuk Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

2. Kesimpulan

Program Prioritas Pemerintahan Jokowi – JK: 4-3-1 ++





Meningkatkan *fiscal space* bagi program-program yang lebih produktif:

- Meningkatkan penerimaan pajak dan PNBK;
- Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L (refocusing);
- Penghematan subsidi;

Meminimalkan kerentanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar:

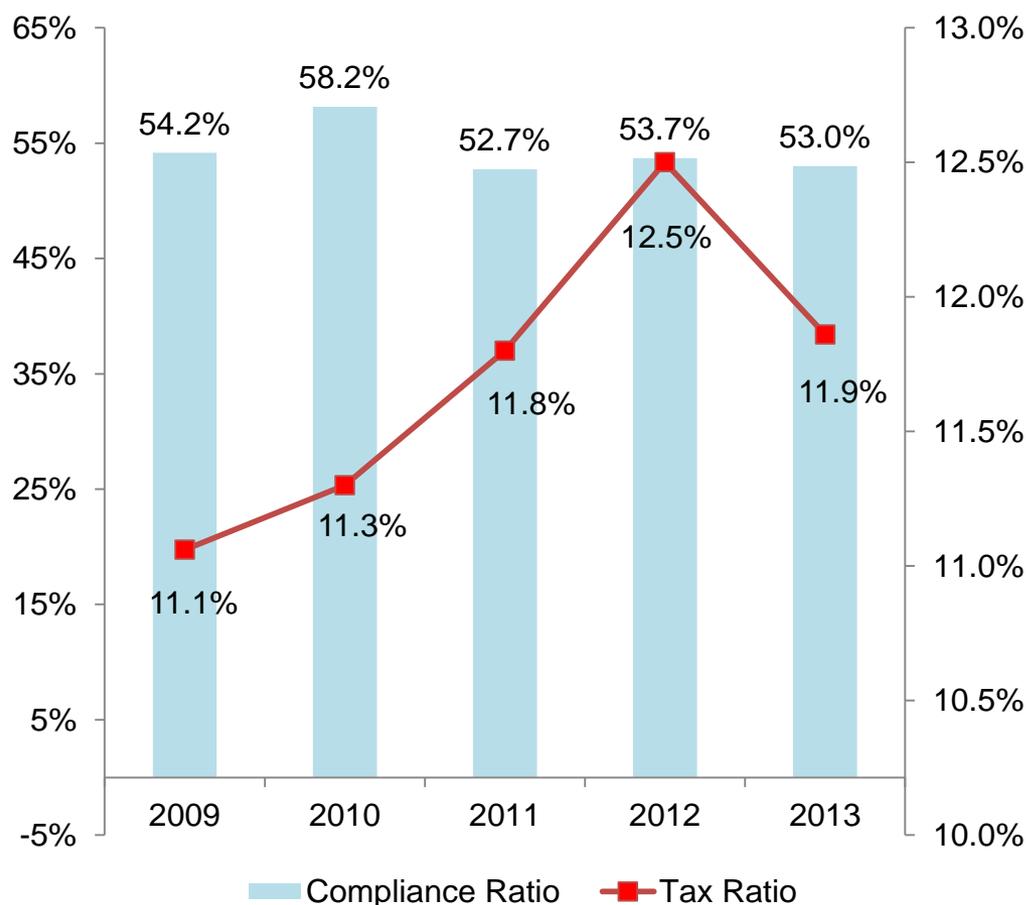
- Reformasi subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy untuk solar dengan subsidi maksimum Rp1.000/liter untuk setiap level harga dan kebijakan harga keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium.

Memperbaiki postur APBN agar lebih produktif dan berkualitas dalam mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti:

- Pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden), meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri), pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah, pembangunan infrastruktur konektivitas.



Tax Ratio Cenderung Menurun



Source: Directorate of Tax Annual Report 2009 - 2012

- Tax ratio Indonesia pada tahun 2014 adalah sekitar 11.4% turun dari 11.9% di tahun 2013. Targetnya adalah mencapai 14%-16% di tahun 2019.
- Peningkatan pendapatan pajak dilakukan melalui strategi ekstensifikasi, yaitu meningkatkan jumlah pembayar pajak.
- Tiga insentif telah diberikan Presiden Jokowi untuk Dirjen Pajak guna mendorong peningkatan pendapatan pajak yaitu: (i) peningkatan kompensasi, (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, (iii) perlindungan Hukum



Update Pendapatan Pajak – 4 Mei 2015 Jam 15.30

Jumlah Pendapatan Pajak Non Migas Per 30 April 2015 Naik 3.65% (Rp 10 Trilyun)
dibandingkan Tahun Sebelumnya

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target Δ% 2014-2015	Realisasi s.d. 30 April					
					2014	2015	Δ% 2013 - 2014	Δ% 2014 - 2015	% Penc. 2014	% Penc. 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)÷6	(10)	(11)=7÷4
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	162.937,17	180.168,94	16,49	10,58	33,53	28,61
	1. PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	32.904,35	36.062,02	16,85	9,60	31,14	28,43
	2. PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	1.917,75	1.786,02	24,39	(6,87)	24,11	18,51
	3. PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	15.773,74	13.826,19	31,36	(12,35)	36,94	24,20
	4. PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	7.812,15	8.522,81	14,61	9,10	30,02	25,46
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	2.490,47	2.702,54	7,86	8,52	48,38	51,82
	6. PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	67.738,02	74.833,43	16,85	10,47	37,29	33,88
	7. PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	9.176,16	11.984,18	(14,99)	30,60	27,91	24,07
	8. PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	25.107,67	30.439,22	23,92	21,23	29,93	24,00
	9. PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	0,25	12,53	25,38	4.974,09	0,57	19,04
B	PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	117.495,46	111.321,97	10,99	(5,25)	24,71	19,31
	1. PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	64.121,62	63.201,71	11,35	(1,43)	23,34	18,69
	2. PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	47.880,87	43.527,91	14,42	(9,09)	27,10	20,98
	3. PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	3.262,28	3.034,91	(13,17)	(6,97)	21,55	15,69
	4. PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	2.164,69	1.519,64	(17,74)	(29,80)	25,77	14,13
	5. PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	66,00	37,81	62,64	(42,71)	10,98	5,67
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	873,22	308,24	97,01	(64,70)	4,02	1,15
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	1.721,45	1.557,20	10,80	(9,54)	33,24	13,28
E	PPh Migas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	31.111,62	16.744,17	75,58	(46,18)	37,09	33,80
Total A + B + C + D		897.456,86	1.244.723,88	38,69	283.027,30	293.356,35	14,25	3,65	28,63	23,57
Total A + B + C + D + E		984.903,21	1.294.258,67	31,41	314.138,91	310.100,52	18,34	(1,29)	29,29	23,96

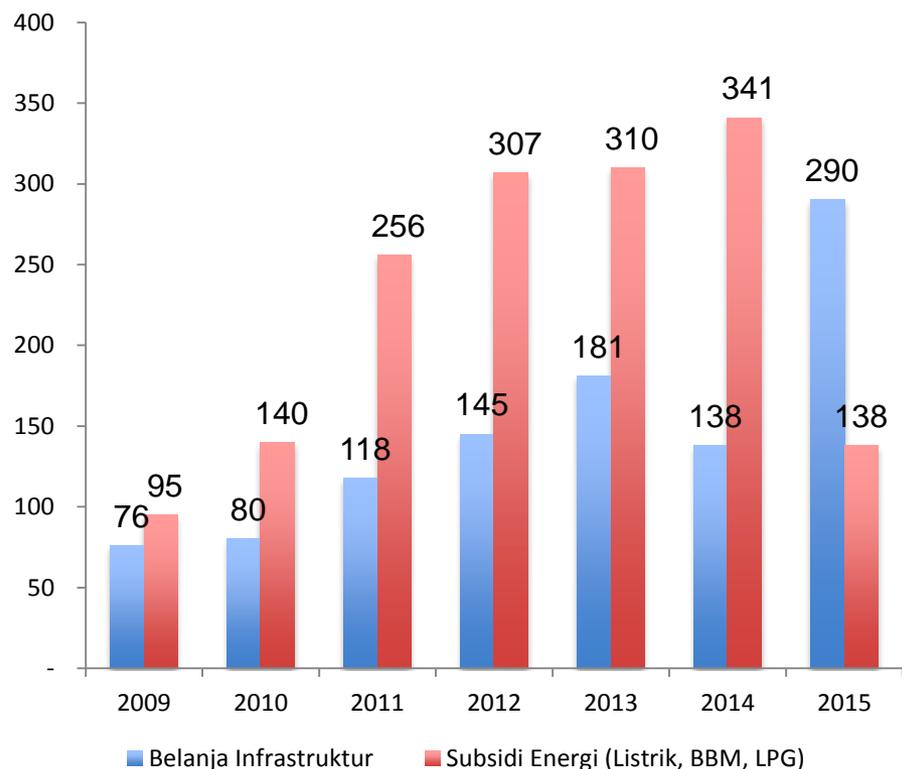
Sumber : Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP diakses 4 Mei 2015 pkl 15:30 (termasuk penerimaan PPh Migas tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 3,95 triliun)



APBN 2015 mengalokasikan Rp 290 Trilyun anggaran infrastruktur, lebih dari 2x lipat anggaran subsidi energi. Hal ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2009

Hal tersebut dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur Indonesia selama 5 tahun kedepan yang diperkirakan mencapai US\$ 545 milyar

Rp Trilyun



Sektor	Rp Trilyun	Ek. US\$ Milyar	Proporsi (%)
Pembangunan Jalan	1,274	106.17	19%
Transportasi Laut	563	47	9%
Rel Kereta Api	278	23	4%
Transportasi Udara	182	15	3%
Transportasi Kota	155	13	2%
Ferry	91	8	1%
Subtotal Investasi Transportasi	2,543	212	39%
Sumber Air	1,091	91	17%
Listrik	1,080	90	17%
Pengairan	666	56	10%
Energi dan Gas	535	45	8%
Perumahan Umum	384	32	6%
Informasi dan Teknologi Komunikasi	242	20	4%
Total Investasi	6,541	545	100%



Pembangunan Infrastruktur 2015: Transportasi - Pertanian - Air

Pembangunan Infrastruktur Transportasi		Rp Trilyun
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		51.66
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api		17.87
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan		8.64
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara		7.76
Pembangunan Infrastruktur Pertanian		Rp Trilyun
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		10.06
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		5.01
Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Sanitasi Air Bersih		Rp Trilyun
Pengelolaan dan Konservasi Waduk Embung Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya		6.23
Pembinaan dan Pengembangan Air Minum		6.79
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		2.81



Fokus Pembangunan SDM

- Pembangunan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan SDM yang bermutu.
- Pembangunan kesehatan diutamakan pada pemantapan pelaksanaan SJSN kesehatan melalui KIS, serta penyediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
- Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh dan akses universal untuk air minum dan sanitasi.



Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

APBN 2015 --Rp46,8 triliun
APBNP 2015 --Rp53,3 triliun *)

Kementerian Ristek dan Dikti:

APBN 2015 --Rp42,3 triliun
APBNP 2015 --Rp43,6 triliun *)

Kementerian Agama:

APBN 2015 --Rp56,4 triliun
APBNP 2015 --Rp60,3 triliun



Kesehatan

Kementerian Kesehatan:

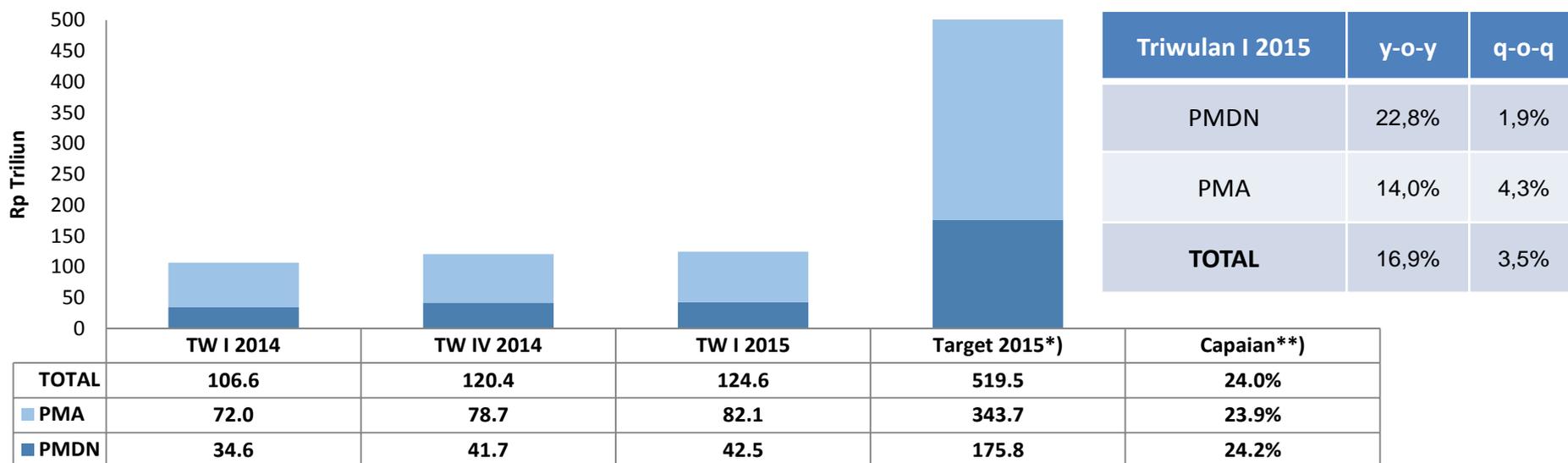
APBN 2015 --Rp47,6 triliun
APBNP 2015 --Rp51,3 triliun

BKKBN:

APBN 2015 --Rp3,3 triliun
APBNP 2015 --Rp3,3 triliun



1. Realisasi investasi per 31 Maret 2015 mencapai Rp 124.6 trilyun, naik sekitar 16.9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau 3.5% dibandingkan triwulan IV 2014.
2. Pencapaian tersebut cukup baik jika memperhitungkan perekonomian dunia dan domestik yang sedang melambat saat ini.
3. Peningkatan investasi ini mengindikasikan prospek pertumbuhan yang akan membaik dimasa mendatang



PMDN : penanaman modal dalam negeri
PMA : penanaman modal asing

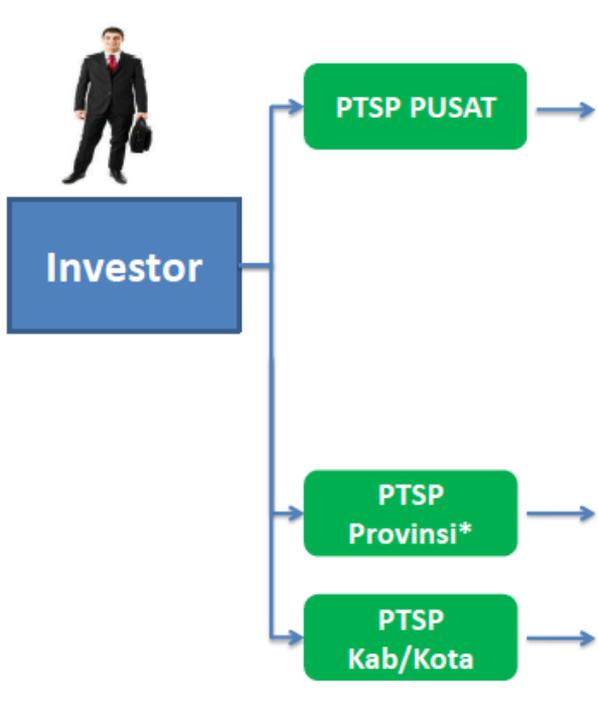
*) Target Penanaman Modal 2015 Renstra BKPM 2015 – 2019
**) Terhadap target 2015

Salah Satunya Melalui Kemudahan Perizinan Untuk Investasi



Pada 27 Januari 2015 Presiden Jokowi Meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM Dengan Tujuan Untuk Memberikan Kemudahan Perizinan Investasi di Indonesia.

Contoh Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk IPP Listrik



	<ol style="list-style-type: none"> Izin Prinsip/IUPL Sementara APIP (Inatrade) Fasilitas Bea Masuk (DBC)* NIK (DBC)* IUPL 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Operasi Penetapan Wilayah Usaha Penugasan Survei Panas Bumi Izin Panas Bumi * Online oleh investor 		<ol style="list-style-type: none"> IPPKH AMDAL
	<ol style="list-style-type: none"> RUPTL Pengadaan (Lelang, Pemilihan langsung, Penunjukan langsung) 	<ol style="list-style-type: none"> PPA/PJBL Financing Date 		<ol style="list-style-type: none"> Izin Terminal Khusus Izin Navigasi Izin Perlintasan Kereta Api
	<ol style="list-style-type: none"> Registrasi SLO (Sertifikat Laik Operasi) secara online 			<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan PKLN
	<ol style="list-style-type: none"> Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) 			<ol style="list-style-type: none"> IMTA Izin Operator Boiler Izin Pesawat angkat Izin Penangkal Petir Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis Pengadaan tanah (tahap pelaksanaan) Sertifikasi 			<ol style="list-style-type: none"> Izin Bendungan Izin konstruksi
	<p>Surat dukungan dari Pemda</p> <p>* Jika lokasi lintas kabupaten/kota diperlukan Izin Lokasi tingkat Provinsi</p>			
	<ol style="list-style-type: none"> IMB (Kab/Kota) Izin Lingkungan Izin Lokasi (Kab/Kota) Izin Gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> TDP 		



Bijih Mineral	Bijih Nikel	Bijih Aluminium
Ekspor YTD Sep 2013		
- Nilai (US\$ mn)	1,143	981
- Volume (Ton)	41,465,189	41,855,775
Rasio Bijih dengan Produk Akhir	75:1 Ferronickel	4:1 Alumunium
Value Produk Akhir		
- Asumsi Harga (US\$/ton)	15,435	1,800
- Nilai (US\$/ton)	8,534	18,835
- Multiplier Effect	7.5x	19.2x

- Pemerintah harus konsisten untuk melarang ekspor biji mineral dan terus mendorong kewajiban untuk hilirisasi sektor tambang mineral.
- Dengan mengambil contoh Bijih Nikel dan Alumunium, peningkatan ekspor dapat mencapai 7.5x dan 19.2x dibandingkan jika diekspor dalam bahan baku mentah.
- Keberhasilan hilirisasi sektor tambang mineral pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak, dan mengurangi ketergantungan impor



1. Tantangan Yang Dihadapi Indonesia

1. Strategi dan Peluang Untuk Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

2. Kesimpulan



- Ketimpangan distribusi pendapatan, daya saing yang rendah, kualitas infrastruktur yang buruk serta perlambatan ekonomi domestik dan global adalah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi-JK
- Presiden Jokowi menekankan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia tidak semata-mata hanya mengejar kepada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Hal ini penting untuk meredam gejolak sosial yang mungkin muncul.
- Oleh karena itu, penekanan dilakukan kepada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas SDMnya. Hal ini lebih detail dijabarkan dalam pencapaian program prioritas 4 (maritim, infrastruktur, pangan, dan energi) 3 (kemiskinan, kesehatan, pendidikan) 1 (reformasi birokrasi)
- Komitmen pemerintah untuk mencapai hal tersebut diatas, tercermin dari alokasi anggaran, dimana anggaran subsidi energi di realokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Selain itu pemerintah juga mendorong peningkatan investasi baik DN dan LN untuk membantu program pembangunan.
- Pemerintah membutuhkan waktu 1.5-2 tahun untuk melakukan sebagian besar perubahan signifikan yang dibutuhkan sehingga masyarakat diharapkan dapat menikmati hasil dari perubahan tersebut.



Program Prioritas 2015 Yang Dipantau KSP

PANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Irigasi (3 Juta Ha)2. Bendungan Baru (25 bendungan)3. Desa Mandiri Benih (1000 desa)4. Desa Organik (1000 desa)5. Pembangunan 5000 pasar tradisional	PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none">16. EMIS – Satu Peta Satu Data17. Tunjangan Fungsional DTPK
ENERGI	<ol style="list-style-type: none">6. Transmisi 500 kV (700 km)7. Jaringan Gas Kota (374.000 SR)8. Kilang Minyak (2 unit @300.000 barrel)	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">18. Puskesmas Rawat Inap (6.000 lokasi)19. Tenaga Kesehatan di DTPK20. Rumah Sehat (50.000 unit)21. SPAM Regional (6 lokasi)22. Lapangan olahraga (330 Paket)
INFRASTRUKTUR (TRANSPORTASI)	<ol style="list-style-type: none">9. Jalan Baru (2.650 km)10. Bandara Baru (15 lokasi)	REFORMASI BIROKRASI	<ol style="list-style-type: none">23. Optimalisasi Jumlah Lembaga Negara24. Supervisi Kinerja Pelayanan Publik
MARITIM	<ol style="list-style-type: none">11. Memenuhi Kekuatan Pertahanan Minimum12. Strategi pencegahan dan penindakan IUU <i>Fishing</i>13. Pelelangan Ikan Terpadu (100 lokasi)14. Rehabilitasi pesisir laut15. Peningkatan kapal penumpang dan barang	DESA	<ol style="list-style-type: none">25. Memastikan redistribusi negara yang terkait dana desa berjalan efektif
		TEKNOLOGI	<ol style="list-style-type: none">26. Mendorong instansi hak cipta dan paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor



Terima Kasih